

**ANALISIS SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP
PENGELOLAAN HKM WOLOBOBO DI DESA TIWORIWU
KECAMATAN JEREBU'U KABUPATEN NGADA
(STUDI KASUS PADA KTH TANGI LIZU, KTH EBU MESU I
DAN KTH EBU MESU II)**

Maria Infiola Yulia Pati¹, Lusiamarimpan^{2*}, Halena Meldy Asa², Roni Haposan Sipayung²

¹Mahasiswa Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana

²Dosen Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana

*Email: lusiamarimpan@staf.undana.ac.id

Abstrak

Keywords:

**Kondisi Sosial
Ekonomi;
Pendapatan; Hutan
Kemasyarakatan;
Kelompok Tani
Hutan**

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan kawasan hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Salah satu daerah di NTT yang sudah mendapatkan IUPHKm adalah HKm Wolobobo di Desa Tiworiwu, Kecamatan Jerebu'u, Kabupaten Ngada yang dikelola oleh 3 KTH. Melalui IUPHKM pemerintah berupaya melibatkan masyarakat sekitar hutan sebagai mitra dalam melakukan pengelolaan hutan. Sistem pengelolaan HKm yang dilakukan oleh masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan Desa Tiworiwu tersebut. Oleh karena itu untuk mengetahui keberhasilan program HKm yang diterapkan di Desa Tiworiwu ini perlu dilakukan penelitian dilihat dari aspek Sosial dan Ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pengelola HKm Wolobobo dan untuk menganalisis pendapatan masyarakat dari pengelolaan kawasan HKm Wolobobo. Penentuan sampel responden pada penelitian ini menggunakan teknik sensus dengan jumlah sampel sebanyak 44 responden. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis kuantitatif.

Secara sosial ekonomi, tingkat umur masyarakat pengelola lahan HKm Wolobobo sebagian besar berada pada umur non produktif dengan tingkat pendidikan yang rendah. Sebagian besar masyarakat memiliki jumlah tanggungan keluarga >5 orang dan pada umumnya pekerjaan utama sebagai petani. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan hasil produksi dari lahan HKm seperti tanaman kopi, jahe, advokat dan sayur pucuk

labu siam untuk biaya kesehatan seperti mendapatkan pelayanan kesehatan serta biaya kebutuhan hidup lainnya. Secara ekonomi, dengan adanya HKm dapat membantu pendapatan masyarakat sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidup. Besarnya pendapatan petani dari lahan HKm Wolobobo yaitu KTH Tangi Lizu sebesar Rp. 77.401.000 dari 17 KK, KTH Ebu Mesu I Rp. 35.849.000 dari 10 KK dan KTH Ebu Mesu II sebesar Rp. 23.785.000 dari 17 KK, dengan total penerimaan sebesar Rp. 196.600.000. Perlu dilakukan peremajaan terhadap tanaman kopi yang usianya banyak yang sudah tua agar produksi kopi lebih banyak serta perlu adanya peningkatan pendampingan dan pembinaan yang intensif serta difasilitasi agar masyarakat dapat mengelola lahan yang telah dibagi secara menyeluruh.

1. PENDAHULUAN

Hutan adalah kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta tumbuh-tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna dan berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi (Arief, 2001 *dalam* Putra dkk., 2022). Saat ini kondisi hutan di Indonesia nampaknya semakin berkurang akibat tingginya laju *deforestasi* yang cukup besar. Berdasarkan data BPS 2022, angka *deforestasi* kawasan hutan di Indonesia pada tahun 2019-2020 sebesar 66.995,7 ha/tahun. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang bertambah dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat ini dapat mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pemukiman ataupun lahan untuk bercocok tanam/berkebun oleh masyarakat, tetapi di sisi lain masyarakat tetap saja miskin dan menggantungkan hidupnya pada kawasan hutan (Puspasari dkk., 2017).

Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 sebanyak 1131,62 ribu jiwa, sedangkan untuk kabupaten Ngada sendiri sebanyak 20,14 ribu jiwa (BPS, 2022). Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2021, masyarakat miskin bukan hanya berada diperkotaan tetapi juga menyebar di berbagai desa yang ada di Provinsi NTT dengan jumlah 3.450 desa, dan tercatat sebanyak 97 desa berada dalam kawasan hutan dan sebanyak 808 desa berada di tepi/sekitar kawasan hutan, di mana umumnya mereka menggantungkan hidupnya pada hutan.

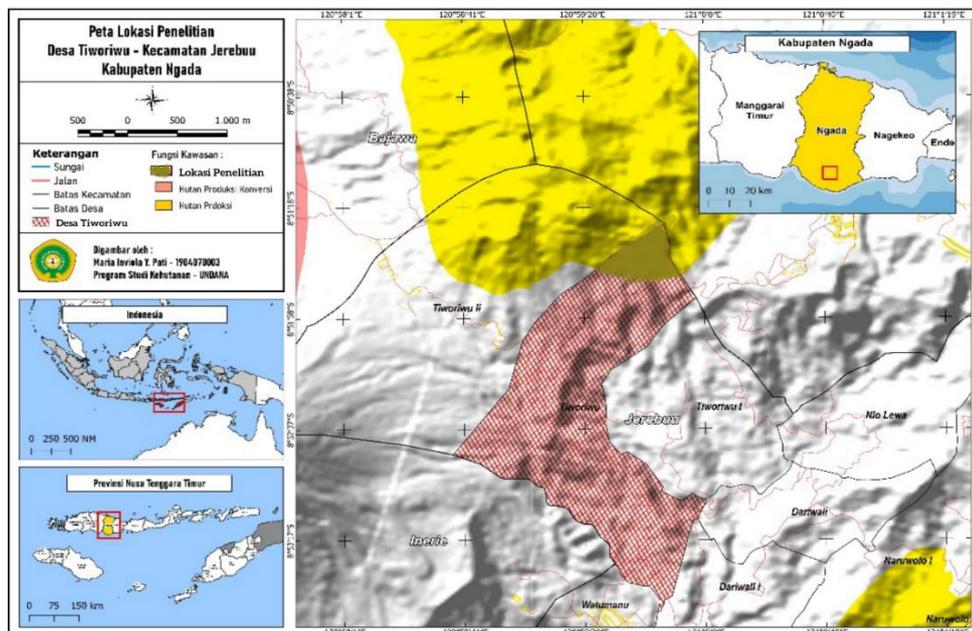
Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan umumnya miskin dan berpendidikan rendah (Suyanto & Khususiyah, 2006 *dalam* Dewi dkk., 2018). Keterbatasan lahan garapan dan rendahnya pendapatan menjadi alasan utama masyarakat menggarap lahan hutan di sekitar tempat tinggalnya (Djamhuri, 2008 *dalam* Dewi dkk., 2018). Hal ini merupakan salah satu bentuk perilaku negatif masyarakat sekitar hutan mengarah pada pengeksploitasian dan pemanfaatan hutan yang berlebihan sehingga mengancam keberadaan dan kelestarian hutan, serta menurunkan peruntukan fungsi dari hutan (Senoaji, 2011 *dalam* Basir dkk., 2020).

Adanya masalah diatas dapat diminimalisir dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat di dalam maupun di sekitar hutan untuk memanfaatkan lahan dan potensi di kawasan hutan melalui program Hutan Kemasyarakatan (HKm). HKm adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.09 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial).

Kawasan Hutan Register Tanah Kehutanan (RTK) 30 Wolobobo merupakan kawasan hutan produksi tetap yang telah mendapatkan izin usaha pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan di KPH Wilayah Kabupaten Ngada. KTH Tangi Lizu, KTH Ebu Mesu I dan KTH Ebu Mesu II termasuk dalam kelompok tani yang telah mendapatkan IUPHKM untuk mengelola lahan HKm Wolobobo yang ada di Desa Tiworiwu, Kecamatan Jerebu'u. Program HKm Wolobobo telah berjalan selama 12 tahun. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui kondisi sosial dan ekonomi masyarakat disekitar kawasan HKm Wolobobo dan untuk menganalisis pendapatan masyarakat dari pengelolaan kawasan HKm Wolobobo di Desa Tiworiwu.

2. METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada KTH Tangi Lizu, KTH Ebu Mesu I dan KTH Ebu Mesu II di HKm Wolobobo, Desa Tiworiwu, Kecamatan Jerebu'u, Kabupaten Ngada pada bulan Juli-Agustus.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, alat tulis, perekam suara, *Laptop dan Handphone*, sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kuisisioner dan *Microsoft Office Exel 2013*. Variabel yang dilihat atau diukur dalam penelitian ini yaitu, Kondisi Sosial Ekonomi (dilihat dari

umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, jenis pekerjaan, kesehatan dan kelembagaannya) dan Pendapatan petani HKM (pendapatan yang diperoleh petani dari lahan HKM dilihat dari jenis tanaman, luas lahan garapan dan biaya produksi). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden melalui wawancara dengan bantuan kuesioner dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan dalam penelitian.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara dengan Bantuan Kusioner dan observasi. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 44 KK terdiri dari 3 KTH, yakni KTH Tangi Lizu 17 KK, KTH Ebu Mesu I 10 KK dan KTH Ebu Mesu II 17 KK. Penentuan sampel menggunakan teknik sensus, dimana jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan (Arikunto, 2012). Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini diambil 100% dari jumlah populasi yang ada pada 3 KTH yaitu sebanyak 44 KK. Selain itu, objek penelitian pada penelitian ini yaitu petani yang mengusulkan izin Hutan Kemasyarakatan di Desa Tiworiwu.

Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan *Microsoft Office Excel*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif untuk menjawab tujuan pertama yaitu untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat terhadap pengelolaan HKM Wolobobo dan analisis kuantitatif untuk menjawab tujuan kedua yaitu, untuk mengetahui pendapatan yang diperoleh masyarakat pengelola HKM Wolobobo menggunakan rumus untuk menghitung pendapatan (Minata dkk., 2021):

$$I = TR - TC$$

Keterangan:

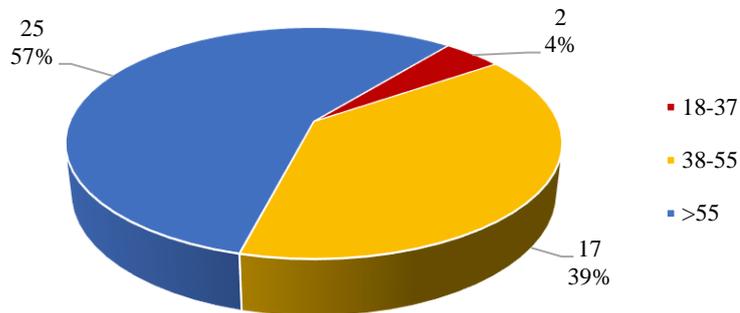
I	: Pendapatan (<i>Income</i>)
TR	: Penerimaan Total
TC	: Biaya Total/Pengeluaran

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pengelola HKM Wolobobo

3.1.1. Umur

Umur merupakan salah satu karakteristik individu yang sangat berperan dalam menentukan kemampuan kerja dan produktivitas kerja responden dalam berusahatani di lahan HKM (Fatahyah dkk., 2018). Menurut Mantra, 2000 dalam Fatahyah dkk., 2018 penggolongan kelas umur dibagi menjadi umur produktif muda (18-37 tahun), umur produktif tua (38-55 tahun) dan umur non produktif (>55 tahun). Data mengenai umur responden dilokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.

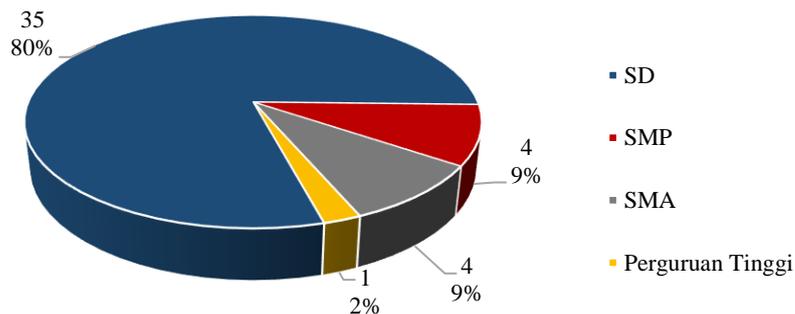


Gambar 2. Umur Responden

Data pada Gambar 2 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar umur responden didominasi oleh responden dengan kategori umur non produktif sebesar 57% (25 Responden). Responden yang berumur non produktif merasa masih kuat bekerja untuk memperoleh penghasilan. Dalam pengelolaan lahan HKm biasanya dibantu oleh keluarga responden. Selain itu, petani tetap harus bekerja di usia tua karena tidak mempunyai jaminan hari tua (pensiun), sehingga harus terus bekerja selama tidak ada yang menjamin hidupnya. Petani yang berumur tua memiliki banyak pengalaman praktek kerja yang tentunya erat kaitannya dengan pengetahuan dalam keberhasilan pengelolaan usahatani (Sari, 2019). Aktivitas harian yang responden lakukan dalam mengelola lahan HKm seperti melakukan penyiangan dan pengeburan tanah.

3.1.2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang semakin tinggi dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengelola hutan (Dewi dkk., 2018).



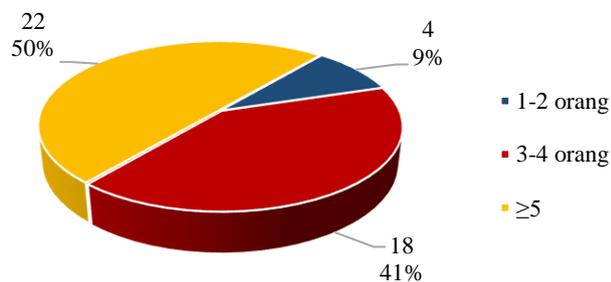
Gambar 3. Pendidikan Responden

Gambar 3 di atas menunjukkan sebagian besar responden yang menggarap lahan HKm Wolobobo hanya sampai jenjang Sekolah Dasar (SD) yaitu sebesar 80%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sarana pendidikan dan kurangnya ekonomi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ketahap selanjutnya. Tingkat pendidikan yang rendah memengaruhi cara berpikir maupun pemahaman atau daya tangkap responden terhadap informasi ataupun pelatihan-pelatihan yang diberikan

pemerintah. Rendahnya pendidikan petani juga berdampak pada pendapatannya karena dalam pengelolaan lahannya hanya berdasarkan ajaran dari turun temurun dan keterbatasan pengalaman tanpa adanya pembelajaran dan pengetahuan baru yang bisa diterapkan (Prasojo dkk., 2021).

3.1.3 Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga juga dapat memberikan gambaran mengenai besarnya potensi ketersediaan tenaga kerja keluarga yang dapat membantu kepala keluarga dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Kadir dkk., 2012 dalam Fatahyah dkk., 2018).

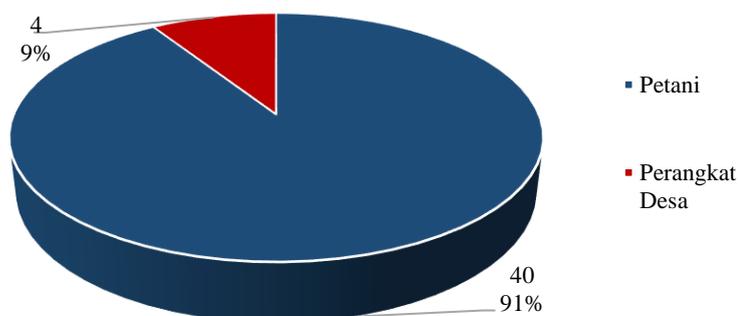


Gambar 4. Jumlah Tanggungan Keluarga Responden

Dari hasil penelitian pada Gambar 4 di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar jumlah tanggungan keluarga anggota KTH penggarap HKm Wolobobo >5 orang sebanyak 22 responden (50%). Jumlah tanggungan keluarga sangat mempengaruhi pendapatan responden. Hal ini mengharuskan petani berupaya sebisa mungkin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari seiring desakan perekonomian yang terus meningkat, sehingga dibutuhkan pekerjaan (Martapani dkk., 2021).

3.1.4. Jenis Pekerjaan

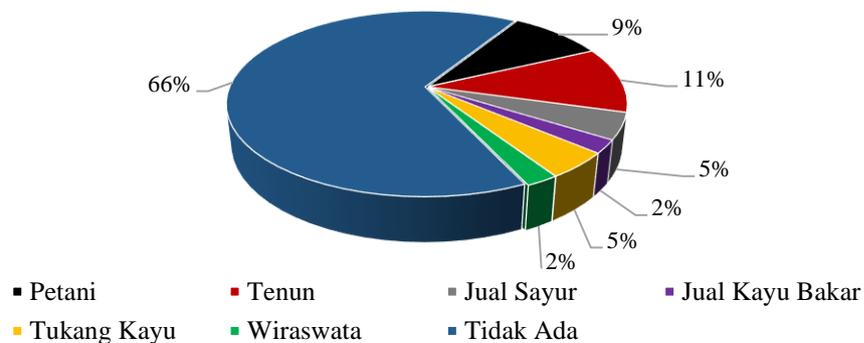
Pekerjaan utama adalah sumber pemasukan ekonomi utama petani yang mengelola HKm Wolobobo yang berada di desa Tiworiwu. Data mengenai pekerjaan utama responden dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Jenis Pekerjaan Responden

Gambar 5 diatas menunjukkan rata-rata pekerjaan utama responden di HKm Wolobobo adalah sebagai petani sebanyak 40 orang (91%). Ini tidak terlepas dari kondisi Desa Tiworiwu yang berada disekitar kawasan hutan dan kebun. Hal ini sesuai dengan pendapat Basuni (2003) dalam Sari, (2020) yang mengatakan bahwa sebagian besar penduduk didaerah sekitar hutan bermata pencaharian disektor pertanian. Sementara 4 orang responden yang bermata pencaharian utama sebagai aparat desa, mengelola lahan hanya pada saat tertentu, sedangkan yang 1 orang diantaranya mengelola lahan yang diperoleh atau diwariskan dari orang tuanya yang sebelumnya sudah tidak bisa bekerja lagi.

Pekerjaan sampingan adalah pekerjaan yang dilakukan selain pekerjaan utama. Pekerjaan sampingan ini dilakukan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.



Gambar 6. Pekerjaan Sampingan Responden

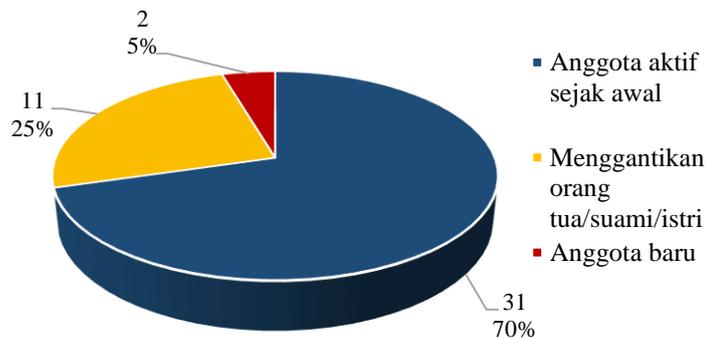
Data pada Gambar 6 diatas memperlihatkan bahwa sebagian besar responden (66%) tidak mempunyai pekerjaan sampingan. Responden yang tidak memiliki mata pencaharian sampingan memilih untuk lebih banyak mengurus ladang atau lahan HKm mereka saja.

3.1.5. Kondisi Kesehatan Responden

Menurut Siri & Jalil (2022) kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Terdapat polindes di desa Tiworiwu. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa responden memilih berobat ke Polindes dan ada yang memilih berobat ke Puskesmas. Beberapa responden yang lebih memilih berobat ke Polindes karena jarak menuju pelayanan kesehatan tidak terlalu jauh dan tidak terlalu memakan waktu, sedangkan jarak ke puskesmas sekitar 5-6 km. Penyakit-penyakit yang sering dialami keluarga responden dan disekitar lingkungan responden yaitu batuk, flu, demam, sakit kepala, diare, gatal-gatal dan malaria. Responden mengaku mengeluarkan biaya yang bervariasi untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Beberapa responden mengaku membayar Rp. 50.000 sampai lebih dari Rp. 100.000 untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau berobat maupun membeli obat. Adanya HKm

Wolobobo sangat membantu masyarakat terkait dengan kesehatan masyarakat. Hal ini tak terlepas dari hasil produksi tanaman HKm sehingga masyarakat dapat memanfaatkan untuk biaya kesehatan.

3.1.6 Sistem Kelembagaan KTH Pengelola HKm Wolobobo



Gambar 7. Keterlibatan Anggota Keluarga Dalam Kegiatan KTH Tangi Lizu, KTH Ebu Mesu I dan KTH Ebu Mesu II

Pada Gambar 7 menunjukkan bahwa dari seluruh responden yang mengelola HKm Wolobobo di Desa Tiworiwu tidak seluruhnya aktif sejak berdirinya ketiga kelompok tani tersebut. Sebagian besar responden (70.45%) menjadi anggota KTH Tangi Lizu, KTH Ebu Mesu I dan KTH Ebu Mesu II sejak HKm Wolobobo ditetapkan menjadi HKm yaitu pada tahun 2010. Hal ini karena sebagian besar petani yang mengelola lahan HKm memperoleh izin dari lahan yang dirambah dan digarap secara ilegal. Sementara beberapa orang responden (25.00%) yang mulai terlibat aktif setelah ditetapkannya HKm sebagian besar adalah keturunan atau keluarga yang diberikan atau diwariskan oleh orang tuanya. Selain itu, responden lainnya (4.55%) merupakan anggota baru yang mulai terlibat aktif sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang.

Adapun kegiatan kelembagaan KTH yang telah dilakukan oleh KTH Tangi Lizu yakni Pertemuan rutin antar anggota kelompok secara berkala yaitu setiap tanggal 30, pelatihan terkait pengelolaan lembaga serta pengelolaan keuangan, pelatihan penanaman jahe, pelatihan administrasi, pelatihan pembuatan sari jahe, pembuatan pakan ternak dan pembersihan lahan HKm anggota KTH secara bergilir; sedangkan kegiatan yang telah dilakukan oleh KTH Ebu Mesu I yaitu pertemuan rutin antar anggota kelompok secara berkala yaitu setiap tanggal 1, pelatihan terkait pengelolaan lembaga serta pengelolaan keuangan, pelatihan administrasi, dan pembersihan lahan HKm anggota KTH secara bergilir; serta kegiatan yang telah dilakukan KTH Ebu Mesu II terdiri dari pertemuan rutin antar anggota kelompok secara berkala yaitu setiap tanggal 3, pelatihan administrasi, pelatihan terkait pengelolaan lembaga serta pengelolaan keuangan dan pembersihan lahan HKm anggota KTH secara bergilir

Kelompok tani hutan pengelola HKm Wolobobo telah mendapatkan sosialisasi dan pembinaan serta penyuluhan dari pihak KPH Ngada. Namun

petugas dari KPH Ngada jarang melakukan pemantauan dalam kawasan maupun pembinaan kelembagaan dikarenakan terbatasnya jumlah dan kemampuan petugas lapangan dari KPH serta penyuluh tidak berada/berdiam di wilayah kelompok tani. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wijaya dkk., (2020) bahwa penyuluh yang tidak berada/berdiam di wilayah kelompok tani membuat informasi yang berhubungan dengan kinerja kelompok tani menjadi lambat. Ini berpengaruh untuk peningkatan kinerja kelembagaan.

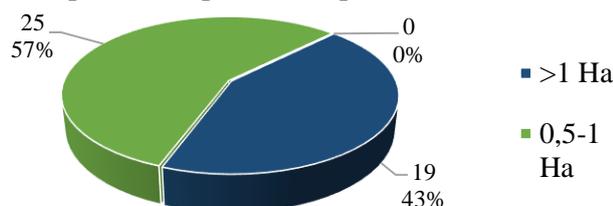
Masyarakat pengelola lahan HKm Wolobobo tentu memiliki kelemahan dan tantangan dalam mengelola lahan HKm seperti kebakaran, jarak lokasi HKm yang jauh sekitar 2-4 km dari tempat tinggal pengelola, belum ada akses jalan menuju lokasi HKm (khusus kendaraan roda 2 dan 4), serta ketidakmampuan tanaman pertanian hidup dengan baik dibawah tegakan utama karena daunnya sangat rimbun serta adanya hama.

3.2. Pendapatan Petani Hutan Kemasyarakatan

Pendapatan responden dari lahan HKm cukup beragam. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti luas lahan, jenis dan jumlah tanaman yang dipanen, hasil panen tiap tahun, frekuensi panen tiap tanaman, dan harga jual (Ma, 2022).

3.2.1. Luas Lahan Garapan

Luas lahan garapan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan dan waktu kerja petani. Menurut Sutomo, 2013 *dalam* Fatahyah dkk., (2018) mengatakan bahwa luas lahan garapan tergolong sempit apabila luasnya <0,5 Ha, tergolong sedang apabila luasnya 0,5-1 Ha dan apabila luas lahan garapan > 1 Ha berarti tergolong luas. Adapun luas lahan garapan petani responden dapat dilihat pada Gambar 8 berikut.



Gambar 8. Luas Lahan Garapan Responden

Pada Gambar 8 luas lahan garapan petani responden yang menempati urutan dengan intensitas tertinggi yaitu dibawah 0,5-1 ha (Sedang) dengan jumlah 25 orang. Luas lahan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani. Semakin luas lahan yang dimiliki petani maka semakin tinggi tingkat pendapatan yang diperoleh petani penggarap (Puspasari dkk., 2017).

3.2.2. Jenis Tanaman

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, lahan HKm Wolobobo yang dikelola oleh KTH Tangi Lizu, KTH Ebu Mesu I dan KTH Ebu Mesu II ditanami berbagai jenis tanaman diantaranya tanaman kehutanan (HHK dan

HHBK), tanaman perkebunan, tanaman pertanian dan tanaman hortikultura. Hal ini sejalan dengan penelitian Hermawati (2016) dalam Puspasari dkk., (2017), dimana pola tanaman tumpang sari dengan beragam jenis tanaman mempunyai nilai tambah lebih bila dibandingkan dengan tanaman monokultur. Adapun jenis tanaman yang ditanam oleh penggarap HKm Wolobobo dari ketiga KTH tersebut disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Jenis Tanaman di Lokasi HKm Wolobobo

Jenis Tanaman	Nama Ilmiah
1. Tanaman Kehutanan	
a. Tanaman HHK (Tanaman Kayu)	
Ampupu	<i>Eucalyptus urophylla</i>
Sengon	<i>Albizia chinensis</i>
Mahoni	<i>Swietenia mahagoni (L.) Jacq</i>
Kayu Putih	<i>Melaleuca leucadendra</i>
Jati Putih	<i>Gmelina arborea Roxb.</i>
b. Tanaman HHBK	
Bambu	<i>Dendrocalamanus asper</i>
2. Tanaman Perkebunan	
Kopi	<i>Coffea Arabica</i>
Pala	<i>Myristica fragrans</i>
3. Tanaman Pertanian	
Jagung	<i>Zea mays</i>
Kacang tali	<i>Vigna unguiculata</i>
Ubi talas	<i>Colocasia esculenta</i>
4. Tanaman Hortikultural	
a. Tanaman Sayu dan Obat-obatan	
Sayur labu siam	<i>Sechium edule</i>
Jahe	<i>Zingiber officinale</i>
b. Tanaman Buah-buahan	
Advokat	<i>Persea Americana</i>
Pisang kapok	<i>Musa aciminata x balbisiana</i>

Sumber: Data primer diolah tahun 2023

Tanaman kayu yang ada pada lokasi HKm mempunyai fungsi ekologi sehingga tidak dapat diperjual belikan. Petani yang mengelola HKm tidak memproduksi seluruh komoditas yang ada di HKm Wolobobo, hanya beberapa komoditas yang diproduksi, didominasi oleh tanaman kopi arabika dan tanaman jahe, sedangkan tanaman advokat dan sayur labu siam hanya beberapa masyarakat saja yang menjualnya. Masyarakat pengelola HKm Wolobobo lebih banyak mengelola tanaman kopi karena pertumbuhannya cukup bagus dan memiliki banyak peminat, sedangkan tanaman jahe

mampu tumbuh subur dan tidak dirusak hama karena tidak disukai binatang landak sehingga memberikan hasil panen yang bagus.

Tanaman jenis kayu yang ditanam tidak dapat diproduksi karena masyarakat yang mengelola HKm terikat aturan yang telah disepakati bersama kelompok sesuai dengan tujuan adanya program HKm. Namun, tanaman-tanaman kayu tersebut dapat dimanfaatkan jikalau usia tanaman itu sudah tua ataupun kayu tersebut telah tumbang. Untuk tanaman HHBK (bambu), pertanian, perkebunan dan hortikultura lainnya tidak diproduksi atau diperjual belikan karena masyarakat cenderung memanfaatkan hanya untuk keperluan konsumsi atau kebutuhan pribadi.

3.2.3. Biaya Produksi

Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh petani HKm Wolobobo dalam mengelola dan memproduksi lahan HKm yang digarap.

Tabel 2. Biaya Tetap Petani KTH Tangi Lizu, KTH Ebu Mesu I Dan KTH Ebu Mesu II Pengelola HKm Wolobobo

No	Jenis peralatan	KTH Tangi Lizu	KTH Ebu Mesu I	KTH Ebu Mesu II	Total	Rata-rata	Persentase (%)
1	Parang	13.500.000	7.950.000	11.800.000	33.250.000	755.682	67
2	Sabit	1.275.000	750.000	1.275.000	3.300.000	75.000	7
3	Pacul	1.700.000	1.000.000	1.700.000	4.400.000	100.000	9
4	Mesin pemotong rumput	3.374.000	5.061.000	0	8.435.000	312.407	17
	Biaya Tetap	19.849.000	14.761.000	14.775.000	49.385.000	1.243.089	100

Sumber: Data primer diolah tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2 biaya tetap terbesar dikeluarkan oleh petani pada KTH Tangi Lizu dengan jumlah Rp 19.849.000 dengan rata-rata Rp 1.167.588 per orang karena mempunyai jumlah anggota yang banyak dengan jumlah 17 orang, sedangkan biaya tetap yang dikeluarkan KTH Ebu Mesu II yang juga memiliki jumlah anggota 17 orang lebih sedikit karena tidak memiliki mesin pemotong rumput, sebesar 14.775.000 dengan rata-rata Rp 869.118 per orang. Biaya tetap terkecil dikeluarkan oleh petani pada KTH Ebu Mesu I dengan jumlah Rp 14.761.000 dengan rata-rata Rp 1.476.000 per orang karena merupakan kelompok dengan jumlah anggota paling sedikit dengan jumlah 10 orang. Hal ini disebabkan oleh komponen-komponen biaya tetap mempunyai harga yang relatif sama sehingga besarnya biaya tetap kelompok dipengaruhi oleh jumlah anggota.

Pada biaya tetap ini, besar-kecilnya biaya yang dikeluarkan oleh para petani tidak mempengaruhi jumlah produksi yang diperoleh, hal ini sejalan dengan pernyataan Sari, (2019) bahwa biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan oleh petani walaupun proses produksi tidak berlangsung atau tertunda dan biaya tetap tidak mempengaruhi volume produksi yang

dihasilkan, dengan kata lain besar kecilnya produksi biaya tetap akan sama besarnya atau tidak mengalami perubahan.

Tabel 3. Biaya Tidak Tetap Petani KTH Tangi Lizu, KTH Ebu Mesu I Dan KTH Ebu Mesu II Pengelola HKm Wolobobo

No	Jenis Biaya Variabel	KTH Tangi Lizu	KTH Ebu Mesu I	KTH Ebu Mesu II	Total	Rata-rata	Persentase (%)
1	Biaya Pembibitan tanaman	5.040.000	0	0	5.040.000	114.545	50
2	Biaya perawatan & perlindungan tanaman	0	0	0	0	0	0
3	Biaya sewa tenaga kerja	1.120.000	770.000	650.000	2.540.000	57.727	25
4	Biaya Panen dan pengangkutan	1.200.000	810.000	590.000	2.600.000	59.091	26
	TOTAL	7.360.000	1.580.000	1.240.000	10.180.000	231.364	100

Sumber: Data primer diolah tahun 2023

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa biaya tidak tetap yang dikeluarkan petani HKm hanya dari biaya pembibitan tanaman, biaya tenaga kerja serta biaya pemanenan dan pengangkutan hasil produksi. Untuk biaya pembibitan tanaman, selain bantuan bibit dari pemerintah, petani HKm melakukan pengadaan bibit sendiri salah satunya dengan membeli bibit. Bibit tanaman yang dibeli yaitu jahe, kopi, sengon, dan jagung. Berdasarkan Tabel 3 juga dapat diketahui bahwa hanya KTH Tangi Lizu yang mengeluarkan biaya untuk pembelian bibit, sedang KTH Ebu Mesu I dan KTH Ebu Mesu II memperoleh bibit hanya dari bantuan pemerintah maupun swadaya sendiri.

Biaya perawatan dan perlindungan tidak ada karena masyarakat pengelola menggunakan pupuk organik yang diperoleh dari bantuan pemerintah dan pengelolaan lahan hanya dilakukan secara manual. Untuk biaya tenaga kerja yang paling banyak dikeluarkan adalah petani KTH Tangi Lizu sebesar Rp 1.120.000. Hal ini dikarenakan pemanfaatan lahan tani oleh petani KTH Tangi Lizu lebih luas sehingga memakan proses yang lebih lama. Selain itu, biaya pemanenan terbesar dikeluarkan oleh KTH Tangi Lizu dengan jumlah Rp 1.200.000. Biaya pemanenan sendiri biasanya dikeluarkan untuk pemanenan jahe dikarenakan umbi jahe yang matang secara bersamaan dan biaya ini dikeluarkan oleh petani pada KTH Tangi Lizu, Ebu Mesu I dan Ebu Mesu II, namun ada juga beberapa anggota KTH yang bisa melakukan pekerjaan sendiri karena hasil produk jahe tidak terlalu besar.

Pada biaya tidak tetap ini, besar-kecilnya biaya yang dikeluarkan berpengaruh terhadap jumlah hasil yang diperoleh dimana semakin besar jumlah biaya yang dikeluarkan maka semakin besar juga jumlah produksi yang diperoleh begitupun sebaliknya (Sari, 2019).

Tabel 4. Biaya Total Petani KTH Tangi Lizu, KTH Ebu Mesu I Dan KTH Ebu Mesu II Pengelola HKm Wolobobo

No	Biaya Produksi	KTH Tangi Lizu	KTH Ebu Mesu I	KTH Ebu Mesu II	Total (Rp)
1	Biaya Tetap (Rp)	19.849.000	14.761.000	14.775.000	49.385.000
2	Biaya Tidak Tetap (Rp)	7.360.000	1.580.000	1.240.000	10.180.000
	Biaya Total (Rp)	27.209.000	16.341.000	16.015.000	59.565.000
	Persentase (%)	46%	27%	27%	100%

Sumber: Data primer diolah tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa biaya total tertinggi dikeluarkan oleh petani KTH Tangi Lizu dengan jumlah Rp 27.209.000 dan biaya total terendah dikeluarkan oleh petani KTH Ebu Mesu II dengan jumlah Rp 16.015.000. Hal ini disebabkan oleh biaya tidak tetap KTH Tangi Lizu yang terlampaui besar dalam memenuhi biaya pembibitan tanaman, biaya tenaga kerja serta biaya pemanenan dan pengangkutan hasil produksi. Biaya total ini merupakan keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan petani dalam menjalankan kegiatan pengelolaan HKm, hal ini sejalan dengan pernyataan Hermanton dkk., (2023) bahwa pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu.

3.2.3. Penerimaan

Penerimaan adalah total produksi komoditi yang dihasilkan dikali dengan harga jual komoditi hutan. Total penerimaan petani disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Total Penerimaan Petani HKm Wolobobo.

No	KTH	Jumlah Produksi (Kg)				Harga (Rp)				Penerimaan (Rp)				Total
		Kopi	Jahe	Advokat	Pucuk Labu Siam	Kopi	Jahe	Advokat	Pucuk Labu Siam	Kopi	Jahe	Advokat	Pucuk Labu Siam	
1	KTH Tangi Lizu	2.810	11.900	30	2.600	15.000	5.000	12.000	1.000	42.150.000	59.500.000	360.000	2.600.000	104.610.000
2	KTH Ebu Mesu I	2120	4.006	30	0	15.000	5.000	12.000	1.000	31.800.000	20.030.000	360.000	0	52.190.000
3	KTH Ebu Mesu II	1.520	3.400	0	0	15.000	5.000	12.000	1.000	22.800.000	17.000.000	0	0	39.800.000
	Total	6.450	19.306	60	2.600					96.750.000	96.530.000	720.000	2.600.000	196.600.000

Sumber: Data primer diolah tahun 2023

Pada Tabel 5 dapat diketahui bahwa penerimaan total tertinggi diperoleh petani KTH Tangi Lizu dengan jumlah Rp. 104.610.000 karena memproduksi Kopi, Jahe, advokat dan sayur pucuk labu siam. Sedangkan penerimaan total terendah diperoleh petani KTH Ebu Mesu II dengan jumlah Rp. 39.800.000 karena hanya memproduksi kopi dan jahe saja dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Untuk penerimaan total KTH Ebu Mesu I lebih besar dibandingkan penerimaan total KTH Ebu Mesu II dengan jumlah Rp. 52.190.000 dikarenakan KTH Ebu Mesu I juga memproduksi kopi, jahe, dan advokat. KTH Tangi Lizu merupakan KTH yang anggotanya lebih aktif dibandingkan KTH Ebu Mesu I dan KTH Ebu Mesu II dimana para anggota dari KTH Tangi Lizu mampu berkoordinasi dengan baik antara sesama anggota maupun dengan penyuluh atau pembina kelompok kemudian bisa mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan dari pihak lain sehingga tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah daerah saja.

Dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan pada petani penggarap HKm Wolobobo, terdapat beberapa keluhan dari responden yang menyatakan bahwa beberapa tahun terakhir ini produksi kopi yang dihasilkannya tidak maksimal. Hal ini dikarenakan banyak tanaman kopi yang tidak produktif yang disebabkan perubahan iklim dan usia pohon kopi banyak yang sudah tua sehingga perlu peremajaan lagi serta beberapa lahan HKm masyarakat mengalami kebakaran. Akibatnya, produksi yang sedikit tentu akan mempengaruhi pendapatan responden, apalagi jika jumlah produksi yang sedikit tentu hasil dari penjualannya pun ikut menurun, ditambah jika harga di pasaran tidak menentu. Hal ini sesuai dengan penelitian Sari, 2019 bahwa penerimaan yang diterima oleh petani jumlah besar atau kecilnya bergantung dari jumlah produksi yang dihasilkan yaitu jumlah produksi HKm dengan harga yang berlaku, semakin besar jumlah produksinya maka semakin besar pula penerimaan yang akan diperolehnya.

3.2.4. Pendapatan

Pendapatan diperoleh dari selisih antara penerimaan yang diperoleh petani dengan biaya total yang dikeluarkan oleh petani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Pendapatan KTH Tangi Lizu, KTH Ebu Mesu I dan KTH Ebu Mesu II

No	Kelompok Tani Hutan	Penerimaan (Rp)	Biaya Total (Rp)	Pendapatan (Rp)
1	KTH Tangi Lizu	104.610.000	27.209.000	77.401.000
2	KTH Ebu Mesu I	52.190.000	16.341.000	35.849.000
3	KTH Ebu Mesu II	39.800.000	16.015.000	23.785.000
	TOTAL	196.600.000	59.565.000	137.035.000

Sumber: Data primer diolah tahun 2023

Pada Tabel 6 pendapatan terbesar yang diperoleh petani sebesar Rp. 77.401.000 yang diperoleh oleh KTH Tangi Lizu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui penerimaan total yang diperoleh petani yaitu Rp. 196.600.000 lebih besar dari biaya total yang dikeluarkan petani yaitu Rp. 59.565.000 dengan pendapatan sebesar Rp 137.035.000. Dengan demikian pendapatan yang diperoleh petani adalah menguntungkan, karena penerimaan lebih besar dari biaya total menurut Soekartawi (1995) dalam Zulkfli (2012).

4. KESIMPULAN

Secara sosial ekonomi, tingkat umur masyarakat pengelola lahan HKm Wolobobo sebagian besar berada pada umur non produktif dengan tingkat pendidikan yang rendah. Sebagian besar masyarakat memiliki jumlah tanggungan keluarga >5 orang dan pada umumnya pekerjaan utama sebagai petani. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan hasil produksi dari lahan HKm seperti tanaman kopi, jahe, advokat dan sayur pucuk labu siam untuk biaya kesehatan seperti mendapatkan pelayanan kesehatan serta biaya kebutuhan hidup lainnya. Secara ekonomi, dengan adanya HKm dapat membantu pendapatan masyarakat sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidup. Besarnya pendapatan petani dari lahan HKm Wolobobo yaitu KTH Tangi Lizu sebesar Rp. 77.401.000 dari 17 KK, KTH Ebu Mesu I Rp. 35.849.000 dari 10 KK dan KTH Ebu Mesu II sebesar Rp. 23.785.000 dari 17 KK, dengan total penerimaan sebesar Rp. 196.600.000.

REFERENSI

- Arief, A. (2001). *Hukum Dan Kehutanan*. Kanisius.
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Basir, B. N., Dassir, M., & Makkarennu, M. (2020). Peran Struktur Sosial Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Desa Betao Riase. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 12(1), 39. <https://doi.org/10.24259/Jhm.V12i1.9210>
- Dewi, I. N., Awang, S. A., Andayani, W., & Suryanto, P. (2018). Karakteristik Petani Dan Kontribusi Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Terhadap Pendapatan Petani Di Kulon Progo. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 12(1), 86. <https://doi.org/10.22146/Jik.34123>
- Djamhuri, T. L. (2008). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Perhutanan Sosial Di Jawa Tengah, Indonesia: Pengaruh Struktur Insentif Dan Modal Sosial. *Agroforestry Systems*, 74, 83–96. <https://link.springer.com/article/10.1007/S10457-008-9150-5>
- Fatahyah, Markum, & Setiawan, B. (2018). *Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara*. 1–9.

- Hermanton, Ansyar, M., & Hermawan, Y. (2023). Analisis Pendapatan Usahatani Nilam (*Pogostemon Cablin Benth*) Di Wilayah Resort Malimbu Bkph Rinjani Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2).
- Kadek, A. N., Putu, N. E. D., & Made, S. (2013). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penduduk Lanjut Usia Masih Bekerja. *Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 9(1), 44–49.
- Kadir, A. W., Awang, S. A., Purwanto, R. H., & Poedjirahajoe, E. (2012). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 19(1), 1–11. <https://doi.org/10.22146/jml.18446>
- Ma, T. N. R. (2022). *Kontribusi Program Hutan Kemasyarakatan Terhadap Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Kelompok Hkm Jita Sambi, Desa Tendambonggi, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende)*. Universitas Nusa Cendana Kupang. Kupang.
- Mantra, I. B. (2000). *Demografi Umum*. Pustaka Pelajar. https://books.google.co.id/books/about/Demografi_Umum.html?hl=id&id=Qcnsaaaamaaj&redir_esc=y
- Martapani, A. N., Fauzi, H., & Naparin, M. (2021). Dampak Hutan Kemasyarakatan Terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Peduli Gambut Sukamaju, Kph Kayu Tangi). *Jurnal Rimba Lestari*, 1(1), 36–46. <https://doi.org/10.29303/Rimbalestari.V1i1.387>
- Minata, M., Seran, W., & Nampa, I. W. (2021). Analisis Pendapatan Komposisi Agroforestri Petani Di Desa Romarea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. *Wana Lestari*, 05(02). <http://ejournal.undana.ac.id/index.php/warnalestari/article/view/6185%0ahttps://ejournal.undana.ac.id/index.php/warnalestari/article/download/6185/3416>
- Prasojo, B. D., Itta, D., & Hafizianor. (2021). *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pelaksana Program Kabupaten Tanah Laut The Socio-Economic Condition Of The Implementing Community Of The Village Forest Program In Sungai Bakar Village , Bajuin District , Tanah Laut Regency Program Studi Kehutanan*. 04(4), 732–740.
- Puspasari, E., Wulandari, C., Darmawan, A., & Banuwa, I. S. (2017a). Aspek Sosial Ekonomi Pada Sistem Agroforestri Di Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. <https://doi.org/10.23960/Js13595-103>
- Puspasari, E., Wulandari, C., Darmawan, A., & Banuwa, I. S. (2017b). Aspek Sosial Ekonomi Pada Sistem Agroforestri Di Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*, 5(3), 95–103. <https://doi.org/10.23960/Js13595-103>
- Putra, L. M. R. Z., Bagenda, C., Saleh, L. F., Sulaiman, S., Satory, A., Holle, E. S.,

- Fardiansyah, H., Nendissa, R. H., Pohan, S., & Ariffudin, Q. (2022). *Hukum Kehutanan*. Media Sains Indonesia Dan Penulis.
- Sari, L. (2019). Analisis Pendapatan Petani Padi Di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Agribisnis*, 1–19. [Http://Eprints.Unm.Ac.Id/13907/1/Jurnal Lusita Sari.Pdf](http://Eprints.Unm.Ac.Id/13907/1/Jurnal%20Lusita%20Sari.Pdf)
- Sari, Y. R. (2020). *Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat Dan Pola Perambahan Di Kawasan Taman Wisata Alam (Twa) Ruteng*. Skripsi Tidak Diterbitkan, Program Studi Kehutanan, Universitas Nusa Cendana, Kupang.
- Senoaji, G. (2011). Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan Lindung Bukit Daun Di Bengkulu. *Sosiohumaniora*, 13(1), 1. [Https://Doi.Org/10.24198/Sosiohumaniora.V13i1.5458](https://doi.org/10.24198/Sosiohumaniora.V13i1.5458)
- Siri, A., & Jalil, A. (2022). Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Dahiango Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. *Jurnal Kerabat Antropologi*, 6(2), 192–208.
- Suyanto, S., & Khususiyah, N. (2006). Imbalan Jasa Lingkungan Untuk Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Agro Ekonomi*, 24(1), 95. [Https://Doi.Org/10.21082/Jae.V24n1.2006.95-113](https://doi.org/10.21082/Jae.V24n1.2006.95-113)
- Wijaya, B., Fauzi, H., & Hafizianor. (2020). Kinerja Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Sylva Scientiae*, 3(1).
- Zulkifli. 2012. Analisis Pendapatan dan Nilai Tambah Pada Agroindustri Kripik Ubi Di Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara. Skripsi. Program studi Agribisnis. Fakultas Pertanian. Universitas Malikussaleh. Kabutaen Aceh Utara.